

EDITORIAL

Pangkas saja sampai Habis

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mengambil langkah rasional. Setelah selesai mengkaji pembangunan gedung baru DPR, mereka memutuskan ketinggian gedung berbentuk huruf U terbalik itu dipangkas dari semula 36 lantai menjadi 26 lantai.

Tak hanya itu. Fasilitas kolam renang dan ruang *fitness* juga dicoret. Alhasil, biaya pun mengerut sekitar Rp300 miliar, dari semula Rp1,1 triliun menjadi Rp777 miliar.

Pemangkasannya itu cukup melegakan. Itu berarti pemerintah mendengarkan kritik masyarakat. Namun, masih ada pertanyaan yang harus dijawab: apa urgensi pembangunan gedung baru wakil rakyat itu?

Gedung baru itu diusulkan untuk dibangun sebagai pengganti Gedung Nusantara I yang kini menjadi kantor para wakil rakyat. Mengapa perlu dibangun gedung baru?

Alkisah, berhem-buslah kabar bahwa Gedung Nusantara I berlantai 24 itu telah miring 8 derajat dan terancam roboh. Para wakil rakyat yang berkantor di gedung itu ketakutan mati. Ketakutan mati itulah yang menjadi landasan kuat untuk mengucurkan uang Rp1,8 triliun bagi pembangunan gedung baru.

“DPR dikenang bukan karena berkantor di gedung supermewah. Mereka diingat rakyat bukan karena fasih melafalkan alamat e-mail yang ternyata bohong.”

Padaahal, gedung berusia 20 tahun yang disebut miring itu masih tegak kukuh berdiri hingga saat ini. Menurut pengukuran dari ITB, gedung itu bahkan masih berdiri lurus.

Setelah menuai protes luas dari masyarakat, DPR tanpa malu-malu dua kali sudah menurunkan biaya pembangunan gedung baru DPR itu, dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,6 triliun lalu turun lagi hingga Rp1,138 triliun.

Alasan pembangunan gedung pun bergeser, dari semula ketakutan mati akibat gedung miring, berubah menjadi karena ruang kerja telah penuh sesak.

Berubah-ubahnya alasan itu menunjukkan sesungguhnya DPR tidak memerlukan gedung baru. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola dan memanfaatkan ruang yang ada.

Kalau dewan sudah memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal, bukan mustahil DPR tidak membutuhkan gedung baru. Artinya, setelah dipangkas 10 lantai, rencana gedung baru itu harus dibabat habis 26 lantai lagi, bahkan sampai 2 meter di bawah tanah, alias kuburhidup-hidup gagasan membangun gedung baru itu.

DPR harus menghentikan pembangunan gedung baru itu karena memang tidak diperlukan. Lagi pula, DPR dikenang bukan karena berkantor di gedung supermewah. Mereka diingat rakyat bukan karena fasih melafalkan alamat e-mail yang ternyata bohong. DPR dihargai karena tekun, gigih, dan berdedikasi mengerjakan tugas sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mediaindonesia.com

NADAL SIAP BALAS DENDAM

Petenis Spanyol itu harus bekerja keras kembali jika ingin gelar *King of Clay* yang disandangnya tetap bersemayam tenang di pundaknya.

Olahraga, Hlm 26



AP/ARTURO RODRIGUEZ

KONFLIK THAILAND-KAMBOJA UJIAN BAGI ASEAN

Amat logis bila Thailand menolak perundingan perbatasan dengan Kamboja diseret ke ranah formal yang sarat aturan mengikat.

Fokus Internasional, Hlm 22-23



ANTARA/WIDODO S. JUSUF

Pemasangan Iklan & Customer Service
No Bebas Pulsa: 0800190090
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P. Jawa + ongkos kirim)



ANTARA/SYAFUL ARIFF

KORBAN MERPATI: Jenazah pramugari pesawat Merpati MA-60 nomor penerbangan MZ-8968, Indriana Puspa Sari Wardhani, 22, dimakamkan di TPU Wates, Magersari, Mojokerto, Jawa Timur, kemarin. Sementara itu di Kaimana, Papua Barat, warga melihat potongan badan pesawat yang berhasil ditemukan tim SAR. **Berita terkait hlm 8**



ANTARA/HUSYEN ABDILLAH

Merpati Pertahankan MA-60

DIREKTUR Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menegaskan maskapainya tetap akan menggunakan pesawat tipe MA-60 karena pesawat itu tidak bermasalah. Sebelumnya, pesawat Merpati MA-60 bernomor penerbangan MZ-8968 tujuan Sorong-Kaimana-Biak jatuh di perairan Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5).

Sardjono menduga kuat peristiwa terjadi lantaran hujan deras yang membuat jarak pandang hanya 2 kilometer. "Karena saksi mata yang kami temui mengatakan pesawat tidak meledak dan tidak patah sayapnya," kata Sardjono saat jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Dia juga membantah adanya tekanan pihak lain dalam pembelian pesawat MA-60. "Ini murni karena pertimbangan bisnis. Jumlah *seat*-nya 50, mendapat *subsidiary loan agreement* dari pemerintah, dan bunganya cuma 3%," tambah Sardjono yang menyebut kerugian materi atas kecelakaan di Kaimana mencapai sekitar US\$15 juta.

Sardjono menuturkan pesawat MA-60 langsung didapat dari perusahaan pembuatnya, PT Xian Aircraft Corporation Ltd, dari China pada 3 Desember 2010. Kelayakan pesawat jenis *propeller* itu telah disertifikasi Civil Aviation Administration of China (CAAC) dan Direktur Kelaikan Udra dan Pengoperasian Pesawat Kementerian Perhubungan. "Artinya, pesawat sudah layak terbang kendati tanpa sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA)."

Sementara itu, proses pencarian pada hari ketiga di perairan Kaimana, kemarin, membuahkan penemuan dua jenazah dan *black box* pendamping. Dua jenazah yang ditemukan diidentifikasi sebagai Joko, mekanik pesawat, dan Abby, anak AKP Tedi Efendi. Dengan demikian, 22 dari 25 penumpang dan kru pesawat Merpati telah ditemukan. Tiga korban yang masih hilang ialah pilot Purwadi Wahyu, kopilot Paul Nap, dan seorang pria dewasa lain. (NG/FD/FO/* /AO/EM/I-1)

Demokrat Tantang KPK Usut Dugaan Suap Wafid

Dua kader Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, disebut-sebut terkait kasus suap.

KRISTANTYO WISNUBROTO

BENDAHARA Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku tidak takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk sarana SEA Games di Palembang.

"Kami meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus ini karena tuduhan-tuduhan yang berkembang jelas merugikan Partai Demokrat dan saya sebagai bendahara umum. Semakin cepat dituntaskan, berbagai isu akan cepat berakhir. Tuduhan itu bisa menjadi jelas dengan pembuktian lewat jalur hukum," ujar Nazaruddin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Mulanya KPK menangkap tangan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris pada 21 April. Pada saat itu KPK menyita cek senilai Rp3,2 miliar. KPK juga memungut ribuan dolar dari tempat sampah di ruangan Wafid.

Nama Nazaruddin, yang juga menjabat komisaris Anak Negeri, disebut-sebut mantan pengacara Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, sebagai atasan Rosalina yang menyuruh Rosalina menemani Idris menemui Wafid. Kamaruddin juga menuding Nazaruddin mendapat jatah 15% dari nilai proyek Wisma Atlet sebesar Rp191 miliar.

Belakangan nama Angelina Sondakh, anggota DPR dari Partai Demokrat, juga terseret dalam pusaran kasus suap tersebut. Angelina disebut-sebut sebagai tim sukses yang bertugas untuk menggeolkan anggaran pembangunan wisma tersebut.

Proses hukum

Angelina hingga kemarin masih berada di luar negeri. Dalam akun *Twitter*-nya pada 8 Mei, Angelina menulis, "Ujian ini benar2 bertubi2...datangnya sekaligus, berbarengan... Ya Allah, tunjukkan aku hikmat dr semua ini."

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan mencuatnya nama Nazaruddin dan Angelina hanya rumor. Karena itu, ia meminta KPK segera menuntaskan kasus tersebut.

Pembelaan terhadap Angelina juga datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat

DPR Jafar Hafsa. "Saya rasa Angie tidak terlibat," katanya.

Menurut Jafar, Angelina sudah memberi penjelasan melalui sambungan telepon karena dia tengah berada di Belanda. "Yang menanyakan keterlibatan mereka (Nazaruddin dan Angelina) adalah dewan kehormatan partai. Tapi secara personal, mereka sudah saya hubungi. Mereka mengaku tidak terlibat," tukasnya.

Meski demikian, lanjut Jafar, Demokrat tetap mengikuti proses hukum yang berlaku untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan Angelina dan Nazaruddin dalam kasus dugaan suap tersebut. Karena itu, kata dia, Demokrat tak akan menghalangi jika KPK merasa perlu memanggil Nazaruddin dan Angelina untuk dimintai keterangan.

Bantahan saja tidak cukup. Ketua KPK Busyro Muqoddas sudah memastikan akan memeriksa mereka yang terlibat jika sudah ada bukti hukum. (* / X-3)

kristantyo@mediaindonesia.com

Dugaan Suap Wisma Atlet

Ditangkap

- **Wafid Muharam**, Seskemenpora
- **M El Idris**, Manajer PT Duta Graha Indah
- **Mindo Rosalina Manulang**, Direktur Marketing PT Anak Negeri

Bukti

- **Cek BCA dan Bank Mega sebesar Rp3,2 miliar**
- **Amplop berisi uang Rp73,171 juta**
- **US\$128.148**
- **AUS\$13.070**
- **€1.955**

Mereka yang diperiksa

1. Dukung Purwadi, Direktur Utama PT Duta Graha Indah
2. Untung dan Adhy Sembada, Satpam Sekretariat Kemenpora
3. Agus Widoni, sopir Mindo Rosalina Manulang
4. Arifin, Ketua Panitia pembangunan Wisma Atlet
5. Rizal Abdullah, Ketua Komite pembangunan Wisma Atlet
6. Rusmadi dan Sahupi, panitia pembangunan Venue SEA Games
7. Dede Ubay, pegawai PT Duta Graha Indah
8. Laurensius Teguh Khasanto, Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah
9. Bambang R dan Edi Purwadi, staf Tata Usaha Kemenpora

Sumber: KPK/Tim Riset MI/GRAPIS: TIVOK

PAUSE

Nyamuk dan Kaki Bau



TYVOK

UNTUK mencari tempat terbaik pada tubuh calon korban, nyamuk malaria biasanya menggunakan karbon dioksida (CO2) yang keluar dari keringat manusia sebagai acuan. "Namun, beberapa meter mendekati calon korban, mereka mengubah arah dan menggunakan bau kaki sebagai acuan untuk mendarat di tempat gigitan favorit mereka, yaitu dari ujung kaki ke paha," jelas Remco Suer, kandidat PhD di Universitas Wageningen, Belanda, mengenai hasil penelitian terbaru yang dilakukannya.

Manusia memang memiliki bau keringat paling menyengat di antara semua makhluk hidup selain tumbuhan. Komposisi keringat manusia didominasi senyawa volatil atau mudah menguap. Di antaranya adalah karbon dioksida, amonia, asam laktat, dan tujuh senyawa karboksilat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bakteri yang hidup di kaki manusia menghasilkan bermacam bau. Sepuluh bau kaki dari bakteri itu, ketika tercampur baur, teridentifikasi menarik nyamuk malaria. (Sciencedaily/* / X-5)

SOLAR BERSUBSIDI MENGALIR KE INDUSTRI (2)

Tetap Langka meski Pasokan Melebihi Kebutuhan



dalam dua bulan terakhir. An-trean mobil mengular setiap hari di sekitar SPBU.

Pasokan solar dari Pertamina sesungguhnya cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan

17.965 mobil bermesin diesel di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pertamina memang 700 kl hingga 800 kl solar bersubsidi ke 70 SPBU dan 25 agen premium dan minyak solar (APMS) di dua daerah itu.

Jika setiap hari semua kendaraan bermesin diesel di dua daerah itu mengisi 30 liter solar, total konsumsi cuma 540 kl per hari. Itu artinya masih ada cadangan 150 kl hingga 250 kl setiap hari. Namun, fakta jauh panggang dari api, solar bersubsidi kian langka. Kuat dugaan solar bersubsidi mengalir deras ke industri, pertambangan, dan perkebunan.

Penyimpangan penggunaan solar bersubsidi Rp4.500 per liter itu dipicu disparitas harga yang mencapai Rp6.000 per liter. Itulah sebabnya warga berlomba-lomba menimbun solar bersubsidi untuk dijual ke industri. Profesi penimbun itu disebut pelangir.

"Dahulu premium sempat langka lalu sopir-sopir angkot jadi pelangir. Sekarang ada peluang dari perbedaan harga solar. Saya ikutan mencari untung dengan menjadi pelangir," kata Kusasi kepada *Media Indonesia* di Banjarmasin, pekan lalu. Ia rela antre berjam-jam di balik kemudi mobil pikap bermesin diesel.

Kusasi mengaku menjual solar bersubsidi yang dibelinya dari SPBU ke pedagang eceran dengan harga Rp6.000 per liter.

Kelangkaan solar bersubsidi bukan semata-mata akibat ulah pelangir. Ada dugaan bahwa penyelewengan itu terjadi sebelum solar masuk ke SPBU. Ikshanudin, salah seorang operator SPBU di Banjarmasin, mengaku pasokan solar dari Pertamina yang datang ke SPBU selalu berkurang. Awalnya, Pertamina memasok dua mobil tangker, tapi kini cuma satu mobil tangker dengan kapasitas 10 ribu liter/hari.

Sales Area Representative

of Pertamina UPMS IV wilayah Kalsel-Kalteng lin Febrian mengaku disparitas harga yang besar menjadi pemicu terjadinya kelangkaan solar karena diselewangkan. "Kami meyakini ada praktik penyimpangan distribusi ke industri," jelasnya.

Setali tiga uang, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengakui konsumsi solar bersubsidi di kawasan industri, perkebunan, dan pertambangan semakin tinggi, terutama setelah harga solar bersubsidi berbanding jauh dengan harga solar nonsubsidi. "Dalam waktu dekat kami akan melakukan operasi penertiban." (Tim/DY / X-3)